



**RENCANA PEMBENTUKAN BPR SYARIAH**

## Terjadi Pro Kontra di Internal Komisi B

**YOGYA (KR)** - Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) antara legislatif dan eksekutif berlangsung dinamis. Salah satunya terkait rencana pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah yang masih terjadi pro dan kontra. Internal anggota dewan di Komisi B yang membidangi hal tersebut pun terbelah.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya dari Fraksi PKS Nurcahyo Nugroho, mengaku mendukung rencana Pemkot Yogya untuk mendirikan BPR Syariah. "Dari faktor ekonomi, berdasar kajian dari FEB UGM cukup menjanjikan. Dana pemerintah bisa dikembangkan melalui BPR Syariah. Sudah ada banyak daerah yang membuat dan perkembangannya bagus," jelasnya, Selasa (12/11).

Nurcahyo mencontohkan, BPR Syariah di Sragen. Sejak didirikan tahun 2007 dengan modal awal Rp 12 miliar, sekarang asetnya sudah lebih dari Rp 180 miliar serta memiliki empat cabang dan lima kantor kas. Melalui penyertaan modal, imbuhnya, Pemkot memiliki peluang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Rencana pembentukan BPR Syariah, imbu Nurcahyo, sudah dibahas di internal Komisi B bersama Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerja Sama (P3ADK).

"Pemkot sudah memasukkan naskah akademik dan raperdanya akan diajukan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020. Kami sangat mendukung," tandasnya. Sementara itu, anggota

Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan Fokki Ardiyanto, justru meminta agar eksekutif menunda rencana tersebut. Alokasi anggaran untuk persiapan pendirian BPR Syariah sebesar Rp 180 juta dinilainya terlalu dini. Hal ini karena Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) belum memutuskan Propemperda 2020 yang berkaitan dengan hal tersebut.

Alasan lain yang mendasari penundaan BPR Syariah ialah kemampuan fiskal daerah. Mengingat, Pemkot Yogya masih punya kewajiban untuk memaksimalkan kinerja dari Bank Jogja yang salah satunya adalah penyertaan modal.

"Dan juga harus dipertimbangkan untuk tahun 2021 ada kewajiban untuk penyertaan modal BPD DIY dan PDAM Tirta Marta. Artinya ini berkaitan dengan kemampuan fiskal mengingat konsekuensi logis dari pendirian BPR Syariah adalah penyertaan modal dan rekrutmen SDM," urainya. **(Dhi)-m**

Instansi	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
1. ....			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005